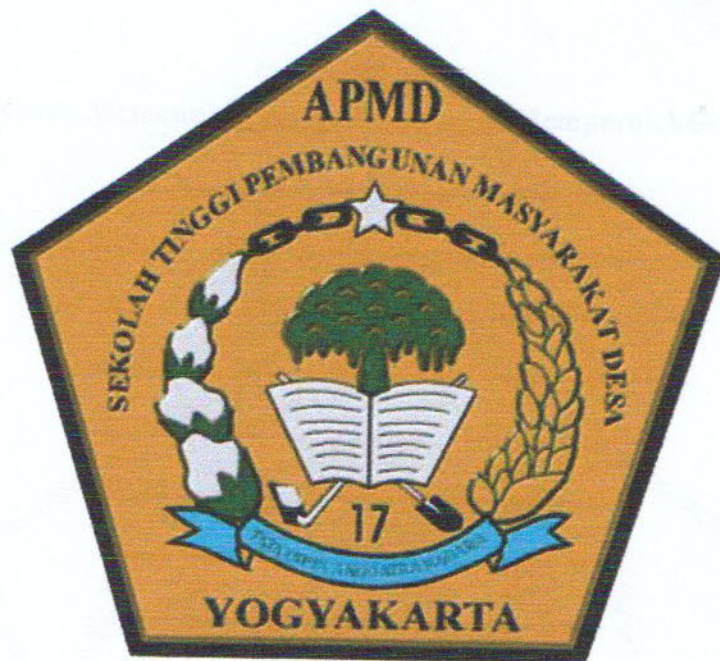


**KAPASITAS LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN  
CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**SETYANINGSIH**

**19520004**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2024**



**KAPASITAS LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN  
CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5 Februari 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Drs. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping I

Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Setyaningsih  
Nim : 19520004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KAPASITAS LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**), adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Penulis



Setyaningsih

19520004

## MOTTO

“Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan.”

*(Bill Gates)*

“Hidup itu keras dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup kita.”

*(Suga)*

“Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia”

*(Mahatma Gandhi)*

”Kita akan dianggap remeh ketika berada di level paling bawah kehidupan di dunia.”

*(Setyaningsih)*

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”

*(Marilyn Monroe)*

“Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihat ke belakang kemudian lihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Jangan lupa betapa berharganya itu. Kamu adalah bunga yang paling indah, lebih dari siapapun di dunia ini.”

*(V)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan karunia yang memberikan segala kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Almarhum bapak Miyono dan ibu Rubinem. Terutama kepada almarhum bapak yang sudah memberikan dorongan dan motivasi ketika masih hidup untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan. Almarhum bapak yang menjadi pemeran utama dalam saya menempuh pendidikan S1 dengan terus memkapasitas semasa hidupnya. Semoga keberhasilan skripsi ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk almarhum bapak yang melihat dari tempatnya sekarang. Terimakasih kepada ibu yang selalu memberikan perhatian kepada penulis untuk terus mengingatkan terkait kesehatan dan selalu mendukung melalui doa. Terimakasih untuk jasa yang diberikan secara ikhlas kepada penulis dari lahir sampai sekarang. Penulis ucapkan terima kasih kepada ibu telah kuat sampai sekarang sebagai motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini,
2. Kepada dosen pembimbing penulis yaitu Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si terima kasih telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu mempertanyakan terlebih dahulu terkait pencapaian pengerjaan skripsi ini. Kepada bapak dosen pembimbing terimakasih karena telah memaklumi segala kendala yang dihadapi penulis.

3. Kepada Lurah Condongcatur, bapak Reno Candra Sangaji,S.IP beserta pamong kalurahan dan masyarakat, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian serta membantu penulis saat mengalami kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Yardhaa Uzlifat terima kasih sudah menjadi bagian dalam kehidupan penulis sebagai teman, sahabat sekaligus partner yang selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih telah menguatkan penulis ketika penulis dalam kondisi tidak baik dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Serta terima kasih untuk selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada kakak penulis yaitu Dedi Setyawan, terima kasih telah membantu menguatkan ibuk selama ditinggal almarhum bapak dan terus mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjaga dua perempuan dalam satu atap dan menjadi pengganti bapak di rumah.
6. Kepada teman baik penulis yaitu Winda Yuliyanti yang menjadi tempat keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada teman-teman perkuliahan dari semester awal sampai dengan masa skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan..

8. Kepada sahabat penulis yaitu kak ina dan kak wanti yang selalu memberikan dukungan dari jauh untuk mengerjakan skripsi ini. Terima kasih menjadi kakak yang terus peduli dengan penulis meskipun dari jarak jauh.
9. Untuk organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI), penulis ucapkan terima kasih telah menjadi wadah belajar penulis semasa perkuliahan.
10. Untuk kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menerima penulis sebagai wadah penulis menuntut ilmu dan belajar berbagai pengalaman..



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KAPASITAS LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**), sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Minardi, S.IP., M.Sc selaku dosen wali yang telah membimbing penulis

6. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan.
7. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Condongcatur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Orang tua, semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Penulis



Setyaningsih

## INTISARI

. Berangkat dari partisipasi di Kalurahan Condongcatur yang terbilang cukup aktif akan tetapi belum menyeluruh masyarakat terlibat. Hal tersebut menjadi persoalan akan kapasitas pemerintah dalam hal mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun. Mengingat bahwa pemerintah kalurahan memiliki kewenangan dalam mengatur, mengurus dan melayani masyarakat. rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan tentang kapasitas lurah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti RPJM Kal, dan profil kalurahan. Penentuan narasumber dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* diantaranya Lurah, Pamong Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat. Lokasi Penelitian di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Teknik analisisnya adalah menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut **Pertama**, Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun belum memiliki kapasitas regulasi. Hal tersebut dapat menjadi suatu kendala tersendiri dalam mendorong partisipasi masyarakat. **Kedua**, Lurah memberikan modal untuk mendorong partisipasi masyarakat agar dapat mencapai tujuan desa membangun. Sebagaimana masyarakat merupakan salah satu aset yang dimiliki kalurahan yang disebut aset manusia guna menunjang pembangunan yang baik. **Ketiga**, Pembagian sumber daya secara merata pada setiap RW yaitu diadakannya proram Rp. 40.000.000-, per RW. **Keempat**, Lurah memiliki kapasitas responsif dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana guna mendorong partisipasi untuk mencapai desa membangun. Hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat yang telah memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik dan **Kelima**, Lurah mengembangkan dan memperluas kerjasama dengan pihak luar melalui jalinan kerjasama dengan PT. Pertamina.. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara kalurahan dengan PT Pertamina untuk membentuk pom bensin, CC Mart dan Nitrogen

Kata Kunci: Kapasitas, Partisipasi, Desa Membangun.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Akademis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
F. Literature Review.....	13
G. Kerangka Konseptual .....	18
1. Kapasitas.....	18
2. <i>Governability</i> .....	20
3. Desa Membangun.....	25
4. Partisipasi.....	30
H. Kerangka Pikir .....	42
I. Metode Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian .....	43
2. Unit Analisis .....	44
3. Teknik Pengumpulan Data .....	47

4. Teknik Analisis Data.....	51
BAB II.....	53
PROFIL KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN .....	53
A. Sejarah Kalurahan Condongcatur .....	53
B. Keadaan Geografis .....	55
C. Kondisi Demografi.....	58
D. Keadaan Sosial Ekonomi.....	67
E. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	70
F. Lembaga Pemerintahan .....	76
BAB III.....	83
KAPASITAS LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN .....	83
A. Kapasitas Regulasi Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun .....	85
B. Kapasitas Ekstrasi Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun.....	87
C. Kapasitas Distributif Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun .....	93
D. Kapasitas Responsif Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terhadap Desa Membangun .....	95
E. Kapasitas Jaringan Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun .....	98
BAB IV .....	101
KESIMPULAN DAN SARAN .....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
LAMPIRAN .....	104
PEDOMAN WAWANCARA .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Narasumber Penelitian.....	47
Tabel 1. 2 Ringkasan Teknik Pengumpulan Data .....	50
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kalurahan Condongcatur.....	55
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan .....	61
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	62
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	64
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	66
Tabel 2. 7 Jenis Mata Pencaharian .....	68
Tabel 2. 8 Jenis Fasilitas Pendidikan .....	71
Tabel 2. 9 Jenis Fasilitas Peribadatan .....	72
Tabel 2. 10 Jumlah Fasilitas Kesehatan .....	73
Tabel 2. 11 Jumlah Fasilitas Perekonomian.....	75
Tabel 2. 12 Daftar Pamong Kalurahan Condongcatur.....	79
Tabel 2. 13 Jumlah Padukuhan Kalurahan Condongcatur .....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kapanewon Depok.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah pemerintahan dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan adat-istiadat dan hak asal-usul. Kewenangan desa salah satunya dalam bidang pembangunan desa yang seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat desa menjadi bagian dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan dari Negara kepada desa, selanjutnya diperjelas fungsi dan kewenangan desa dengan memperkuat kedudukan desa sekaligus masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan.

Tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan dilihat dari partisipasi yang tercipta. Partisipasi menjadi penting sebagai prioritas utama dalam program pembangunan. Partisipasi merupakan proses dimana anggota masyarakat saling berbagi pandangan dan menjadi dominan dari proses pembuatan keputusan serta berbagai tahapan dari pembangunan baik dari perencanaan sampai pemanfaatan hasil. Namun, tidak dimungkinkan jika

dalam proses partisipasi pihak yang berkepentingan akan berusaha mengambil alih ataupun mempengaruhi pemegang kewenangan serta mengontrol disaat perumusan inisiatif-inisiatif pembangunan.

Partisipasi adalah bentuk dari sistem desentralisasi yang diberikan kepada desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan otonominya, desa memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Partisipasi diartikan sebagai makna interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hubungan keduanya seharusnya saling menguntungkan dan bersifat dua arah sehingga partisipasi memiliki 2 (dua) unsur penting. Unsur yang dimaksud adalah keterwakilan dan keterlibatan. Unsur keterwakilan merupakan unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokratis. Partisipasi termuat peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi masyarakat tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sedangkan unsur keterlibatan merupakan unsur dalam partisipasi yang mana

dalam pembuatan suatu keputusan perlu melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan seperti permasalahan publik, Suatu permasalahan yang ada di publik diputuskan dan direncanakan melalui pembangunan secara bersama-sama. Dalam unsur ini, jika suatu partisipasi memuat unsur keterlibatan maka akan membuat sulit masuknya intervensi dari golongan yang berkepentingan. Demikian partisipasi diartikan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan (Adisasmita, 2006;38).

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat tidak terlepas dari adanya syarat sebagai pendukung berjalannya partisipasi. Seperti pada halnya yang sering dijumpai dengan adanya partisipasi yang bersifat semu ataupun simbolik saja. Dengan keterbatasan yang dimobilisasi oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi tentu hanya bersifat semu dan simbolik karena setiap putusan hanya ditentukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan golongan dan bukan kepentingan bersama. Partisipasi yang seharusnya diciptakan untuk menjawab persoalan bersama dan mampu mengakomodir kepentingan bersama melalui musyawarah. Maka syarat untuk mendukung berjalannya partisipasi meliputi keleluasaan, ruang politik, ruang sosial, kesediaan dan kepercayaan serta kemampuan. Dari kelima syarat tersebut, kemampuan menjadi syarat yang sulit terwujud karena ketidakmampuan kedua belah pihak yaitu pemerintah desa maupun

masyarakat untuk mewujudkan nilai, prinsip dan mekanisme partisipasi secara nyata dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan adanya paradigma desa membangun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut, tentunya didukung dengan partisipasi masyarakat yang sangat penting guna mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada paradigma desa membangun menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan.

Pada hakikatnya, desa membangun diartikan sebagai upaya yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mencapai desa yang mandiri. Dalam artian, pemerintah desa adalah salah satu unsur penting untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat setempat. Desa sebagai tumpuan atau harapan dari segala bentuk urusan dan unsur yang berbeda, sehingga desa membangun perlu diupayakan sebagai suatu proses yang bergerak maju dengan tumpuan kekuatan masyarakat desa sendiri. Sehingga peran masyarakat perlu ada dan dominan sebagai pelaku pembangunan.

Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya desa guna

menciptakan desa membangun. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka pemerintah desa penting untuk peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi pendukung dalam terlaksananya pembangunan desa. Program pemerintah yang efektif perlu adanya kapasitas pemerintahan dalam memotivasi, mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Beranjak dari masalah-masalah yang bersinggungan dengan partisipasi yang ditunjukkan melalui studi-studi terdahulu bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Kurangnya partisipasi dapat menyebabkan suatu pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Kendala partisipasi meliputi banyak hal seperti kurangnya akses informasi, tidak adanya ruang gerak, sumber daya manusia dan lainnya. Partisipasi menjadi hal yang sangat signifikan dalam suatu pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Ketiadaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang urgen dan dapat menghambat terciptanya desa membangun. Dalam penelitian yang berjudul “studi tentang partisipasi



masyarakat dalam pembangunan desa di desa dempar kecamatan nyuatan kabupaten kutai barat” oleh Valentina Ayu Astika Hagang , Adam Idris, dan Melati Dama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berjalan kurang maksimal dikarenakan masyarakat tidak terlibat dalam berpartisipasi disebabkan kurangnya informasi terhadap masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan masuknya intervensi oleh elit guna mencapai kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat pada umumnya. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentu merujuk pada kapasitas pemerintah yang kurang memberikan arahan, pemberitahuan serta dorongan kepada masyarakat.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat tentu diperlukan kapasitas pemerintah desa untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam desa membangun. Pemerintah desa dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menentukan prioritas pembangunan berdasarkan pada potensi dan kebutuhan. Selama ini banyak proses penentuan prioritas pembangunan yang kebijakannya ditentukan oleh dominasi elit dengan akses informasi dan kekuasaan yang dimiliki. Hal tersebut dapat ditangani melalui pemerintah desa yang mendorong partisipasi masyarakat melalui kapasitas yang dimiliki untuk terus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, dimana kedudukan keistimewaan yang dimiliki DIY berasal dari sejarah dan hak asal-usul menurut UUD RI 1945 guna mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Atas dasar lahirnya Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yang menyebutkan perubahan penyebutan wilayah dari daerah kabupaten, dimana sebutan lain dari kecamatan ialah kapanewon, sebutan lain dari kecamatan dari wilayah kota ialah kemitren, dan sebutan lain dari desa di wilayah DIY ialah kalurahan.

Pemerintah Kalurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam pelaksanaan kewenangan, pemerintah kalurahan dibantu oleh pamong kalurahan yang dikepalai oleh carik. Lurah sebagai pimpinan tertinggi yang berada pada pemerintahan kalurahan dan berperan sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mendukung berjalannya suatu pembangunan. Di salah satu wilayah Kabupaten Sleman yaitu Kalurahan Condongcatur dengan lurah yang menjabat adalah Reno Chandra Sangaji, S.IP. Kalurahan Condongcatur yang terdiri dari 18 Padukuhan 64 Rukun Warga (RW), 208 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 48.884 jiwa. Pada masa pemerintahan Lurah Reno dalam konteks pembangunan berhasil mengupayakan pembangunan dalam bentuk fisik dan non fisik. Pembangunan dalam bentuk fisik berupa jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Sedangkan dalam bentuk non fisik berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya.

Partisipasi masyarakat di Kalurahan Condongcatur dalam kategori cukup aktif akan tetapi dengan keterlibatan masyarakat yang belum menyeluruh. Artinya belum keseluruhan dari masyarakat terlibat dalam sumbangsih pembangunan. Sumbangsih yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk uang melainkan mencakup tenaga, pikiran, gagasan, serta lainnya. Adapun beberapa dari masyarakat yang masih minim kesadaran dan pengetahuan terkait merumuskan potensi serta masalah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, Faktor lain dari kurangnya kepercayaan diri dari sebagian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi juga mempengaruhi perencanaan program pembangunan yang akhirnya akan menimbulkan rasa kurang puas dari masyarakat itu sendiri. Penyebabnya adalah kurang puasnya masyarakat terkait program pembangunan yang direncanakan.

Pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Condongcatur berdasarkan temuan pra observasi masih ditemui adanya persoalan mengenai sarana dan prasarana. Dimana sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan fisik seperti gedung dan sarana transportasi. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam mengenali persoalan masih lemah, sehingga persoalan yang dikemukakan lebih kearah usulan semata, bukan murni penggalan masalah dan kebutuhan, sehingga data dan informasi mengenai persoalan, masalah, potensi dan kebutuhan belum maksimal. Kondisi seperti ini sangat penting didukung oleh sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk saling ikut serta dan mampu memberikan saran baik secara langsung

maupun tidak langsung. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat penting guna meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan tujuan menarik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebutuhan yang didasarkan pada pengenalan masalah yang ada. Sehingga masyarakat dapat menempatkan diri sebagai bagian dari proses pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pemanfaatan hasil.

Berangkat dari hasil temuan peneliti yang mendapat informasi dari salah satu masyarakat terkait partisipasi di Kalurahan Condongcatur yang mana menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum menyeluruh terlibat dalam pembangunan. Serta beberapa dari masyarakat yang masih minim kesadaran dan pengetahuan terkait merumuskan potensi serta masalah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi persoalan akan kapasitas pemerintah kalurahan dalam hal mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun. Mengingat bahwa pemerintah kalurahan memiliki kewenangan dalam mengatur, mengurus dan melayani masyarakat. Kapasitas yang diperlukan adalah kapasitas dari pemimpin kalurahan yaitu Lurah yang akan dilihat melalui asas subsidiaritas yang mana memberikan dukungan dan memkapasitas masyarakat guna menunjang partisipasi masyarakat. Lurah memberikan dorongan, kepercayaan dan mendukung prakarsa serta bertindak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan desa membangun.

Seorang Lurah sebagai pemerintah kalurahan dengan kapasitas yang dimiliki serta dibantu oleh jajaran aparat kalurahan tentunya untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kalurahan oleh negara, guna menjadikan proses pemerintahan dapat mencapai *good governability*, yaitu dimana seluruh rangkaian proses pemerintahan kalurahan memiliki kapasitas yang baik dalam kualitas yang tidak hanya untuk yang diperintah, tetapi juga berlaku bagi mereka yang memerintahkan serta terjadinya interaksi atau hubungan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakatnya berjalan dengan baik. Terutama untuk mendorong partisipasi masyarakat sangat penting adanya kapasitas Lurah untuk mencapai desa membangun bersama masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan gagasan ini penulis beranggapan bahwa Lurah dibantu oleh pamong kalurahan penting memiliki suatu kapasitas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan dorongan partisipasi masyarakat maka dapat membantu merumuskan pembangunan dengan memperhatikan adanya potensi dan peluang sumber daya. Maka, penulis akan menggunakan perspektif *governability* dalam penelitian ini. *Governability* secara garis besar tentang kapasitas Lurah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas Lurah melalui 5 (lima) indikator yaitu kapasitas regulasi, ekstraksi, kapasitas distributif, kapasitas responsif, dan kapasitas jaringan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada indikator menurut Rozaki (20005) yang meliputi 5 (lima) kapasitas sebagai berikut:

1. Kapasitas Regulasi Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun
2. Kapasitas Ekstrasi Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun
3. Kapasitas Distributif Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun
4. Kapasitas Responsif Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun
5. Kapasitas Jaringan Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait kapasitas Lurah beserta kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun melalui indikator kapasitas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu secara akademis dan praktis, berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan khususnya terkait kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam desa membangun. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah Kalurahan Condongcatur**

Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan Condongcatur terkait kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembaca tentang kapasitas Lurah berupa hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam mendorong partisipasi masyarakat, karena penelitian ini memusatkan perhatian pada kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam desa membangun.

**F. Literature Review**

Studi tentang kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun menggunakan perspektif *governability* yang membahas terkait 3 kata kunci penting yaitu kapasitas, partisipasi, dan desa membangun. Pada masa sekarang ini dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat, melainkan bukan hanya untuk administrasi dan proyek semata. Hal tersebut membuat timbul pertanyaan terkait pentingnya partisipasi masyarakat itu sendiri dalam suatu pembangunan sehingga bukan hanya simbolik. Maka timbul pernyataan lanjutan terkait kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat sehingga tercipta desa yang membangun. Suatu kapasitas Lurah menjadi penting dalam mendorong partisipasi baik dari mengatur, mengurus dan melayani masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan.

Dengan sistem desentralisasi yang dimiliki kalurahan menjadikan pemerintah kalurahan memikul tanggungjawab penuh untuk mendorong

partisipasi masyarakat. Kapasitas yang dimiliki pemerintah kalurahan dalam memenuhi tanggungjawab guna menciptakan desa yang berdesa, artinya menciptakan suatu pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan turut dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan hadirnya paradigma baru yang kemudian membentuk “desa membangun”. Dalam artian pemerintah kalurahan bersama masyarakat dituntut untuk mandiri dalam membangun desanya. Oleh karena itu, partisipasi penting untuk terus ditingkatkan dan didorong guna menciptakan suatu pembangunan yang dapat menyelesaikan permasalahan bersama dan untuk kepentingan bersama.

*Literatur Review* yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Kapasitas Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun”. Penelitian sebelumnya menjadi referensi penulis untuk melakukan penelitian dengan sedikit atau banyak persamaan dalam penelitian yang dilakukan sekarang dengan sumber penelitian yang sebelumnya.

*Pertama*, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta”, yang ditulis oleh Rif’atul Mahmudah dan Johanna Debora Imelda. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kapasitas kepemimpinan dibutuhkan dalam mewujudkan partisipasi. Kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan

pembagian tugas dan menghadirkan kerelawanan. Persoalan kapasitas ini penting karena merupakan salah satu isu dalam partisipasi di berbagai tempat di dunia.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh kecamatan Abiansema Kabupaten Badung”, yang ditulis oleh I Ketut Suarjaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu kepemimpinan dari pemimpin yang menjadi panutan masyarakat, kapasitas organisasi kemasyarakatan yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman informasi program karena kurangnya pendekatan pemerintah dengan masyarakat dan adanya pelaksanaan program yang lama (melanjutkan proses program yang lama yang belum tuntas).

*Ketiga*, jurnal yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang”, yang ditulis oleh Antonius Erwandi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa usulan yang hanya disampaikan pada saat musrenbangdesa. Motivasi masyarakat dalam keterlibatan sangat rendah yaitu sebagai pekerja upahan dalam pelaksanaan kerja proyek pembangunan oleh pemerintah desa dan belum pernah di kerjakan secara gotong-royong atau dalam bentuk swadaya masyarakat. Sumber Daya Manusia pada pemerintah desa sudah sesuai dengan standar pendidikan

SMA sederajat sedangkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 akan tetapi belum memiliki pemahaman dalam menggerakkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam sistem pembangunan.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene), yang ditulis oleh Munawir Arifin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene belum maksimal di karenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa belum mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan”, yang ditulis oleh Fadjar Tri Sakti, Muhamad Rizki Paisal, Muhammad Rohmatullah, Nadiya Asyri Nur Fadillah, dan Putri Siti Nur Ihsani. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Kepala Desa sebagai bagian pemerintah desa dalam memimpin dan menggiring masyarakat sehingga masyarakat mau terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa merupakan hasil dari sebuah kerja keras beliau dan perangkat desanya. Faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya; tersedianya potensi sumber daya alam, tersedianya anggaran untuk pembangunan,

adanya orientasi untuk maju (masa depan), adanya sinergitas yang baik antarapemerintah dan masyarakat, dukungan sosial, dukungan keluarga, dan memperjuangkan gender.

Dari kelima jurnal yang telah diuraikan diatas, posisi penelitian ini akan mengungkapkan permasalahan terkait kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terutama dalam bidang pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan memposisikan dari perspektif ilmu pemerintahan yang mencakup mengatur, mengurus dan melayani masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Sehingga penulis melakukan penelitian melihat dari sudut pandang pemerintahan melalui *perspektif governability*. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat menurut Rozaki (2005) melalui indikator kapasitas yaitu Kapasitas Regulasi, Kapasitas Ekstrasi, Kapasitas Distributif, Kapasitas Responsif, dan Kapasitas Jaringan. Serta analisis mengenai partisipasi masyarakat di Kalurahan Condongcatur menggunakan aspek menurut *Monograph On Politics and Government 2009* “Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan yang Baik: partisipasi, Transparantif, dan akuntabilitas”.



## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Kapasitas**

Kapasitas atau *Capacity* memiliki makna kemampuan atau peranan. Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan. Morgan (2006) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2012) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Menurut JICA (2004) kapasitas merupakan kemampuan dari individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, memperoleh sertifikasi mengikuti pelatihan atau pendidikan. Pengertian lebih luas, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif.

Kemudian *United Nation Development Program (2006)* mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang di miliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melakukan fungsinya, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan.

### **Kapasitas Lurah**

Rozaki (2005) mengaskan bahwa kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama di kenal dalam manajemen pemerintahan yang mengandung arti keahlian, keterampilan dan profesionalitas, efektivitas, efesiensi, kinerja.

Menurut Rozaki (2005) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

1. Kapasitas Regulasi

Kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;

2. Kapasitas Ekstrasi

Kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan asat-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat;

### 3. Kapasitas Distributif

Kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

### 4. Kapasitas Responsif

Kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk di jadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa;

### 5. Kapasitas Jaringan

Kemampuan pemerintah dan warga masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

## 2. *Governability*

Kapasitas tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep *governability*. Salah satu konsep *governability* tersebut menurut Sutoro Eko dalam bukunya “Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan”, menyebutkan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Secara harafiah, *governability* berarti *ability of government in governing*, kemampuan Pemerintah dalam memerintah. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang yang memerintah (*governing*) terutama Pemerintah;
- b. Sudut yang diperintah (*governed*). Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah. Namun umumnya, banyak bicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi;
- c. Sudut interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*..

Sutoro Eko juga menyampaikan bahwa *Governability* mengandung 5 (lima) dimensi, yaitu kapasitas, otoritas, aktivitas, efektivitas memerintah dan legitimasi yang dilakukan Pemerintah. Dengan menggunakan 5 dimensi *governability* tersebut, *governability* dapat diartikan sebagai kemampuan Pemerintah dalam memerintah sesuai dengan regulasi dan pelayanan. Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah dan terdapat interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dalam memberikan perintah, Pemerintah menggunakan otoritas untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, maka *governability* adalah pemerintah desa dan masyarakat desa yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga untuk mengkaji terkait *governability* pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dilihat melalui kapasitas

pemerintah desa. Menurut Sutoro eko, *Governabilty* yang diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memerintah sesuai regulasi dan pelayanan. Adanya regulasi yang mengatur menjadikan pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktifitas dan efesiensi di dalam masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa kewenangan pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang meliputi timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam wewenang pemerintahan, disimpulkan bahwa terdapat hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan perbuatan atau tindakan pemerintah. Berdasarkan pendapat ini, "kewenangan" akan menimbulkan "wewenang". Bersamaan dengan pilar utama negara hukum adalah negara hukum, berdasarkan asas negara dipahami bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari negara hukum, yaitu sumber kekuasaan pemerintahan. ketentuan hukum.

Berdasarkan makna yang berhubungan dengan sumber kewenangan ini, kewenangan juga merupakan faktor penting sebagai hak yang dimiliki desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa pembahasan tentang wewenang tidak hanya cermat tentang kekuasaan penguasa, tetapi juga tentang siapa yang menjalankan dan menerima kekuasaan.

kewenangan yang kompeten harus memperhatikan apakah orang yang menjalankannya menerimanya.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah kekuasaan warisan yang masih ada dan atas prakarsa Desa atau atas prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dikelola secara efektif atau yang timbul dari pembangunan desa dan prakarsa masyarakat desa. salah satunya dalam partisipasi pembangunan,

Desa memiliki kewenangan untuk “mengurus” dan “mengatur”. Namun dalam menjalankan kewenangannya, desa harus menerapkan aturan main (peraturan) yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibuat, agar dapat dibuat. sehingga mengikat pihak yang berkepentingan dan menerapkan aturan ini. atau bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan atau layanan pembangunan dan untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul.

### **3. Desa Membangun**

#### **a. Makna Desa Membangun**

Konsep membangun desa dan desa membangun tentunya memiliki perbedaan pengertian. Kedua kata tersebut berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Untuk mengetahui secara sistematis perbedaan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun), Eko (2014:38-39) menguraikan beberapa perbedaan tersebut ialah dalam hal isu, “membangun desa” lebih mengarah pada bagaimana desa di suatu wilayah dapat berkembang dengan adanya pertumbuhan penduduk, meningkatnya lapangan pekerjaan, serta tersentuh pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Artinya, dalam hal ini pemerintah menjadi penguasa dan desa hanya sebagai objek. Sedangkan pada “desa membangun”, lebih berfokus pada bagaimana desa tersebut secara mandiri berkembang tanpa adanya campur tangan Pemerintah dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya serta adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat sekitar. Artinya, dalam desa membangun



pembangunan bukan dari atas ke bawah melainkan dari berawal dari bawah ke atas (bottom up).

Amanulloh (2015:9-11) menjelaskan atas adanya Undang-Undang Desa yang mengakui Desa sebagai subjek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas, maka demokratisasi desa merupakan merupakan frase tersendiri yang sangat mewakili Undang-Undang tersebut. Nilai penting demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedua, salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven*

*development–CDD*) berubah menjadi pembangunan yang digerakkan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunan (*village driven development–VDD*) dengan beberapa karakteristik berikut (Eko, 2014:45-46):

1. Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Kepentingan dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem desa.
3. Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal.
4. Kepala desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan berdiri dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat.
5. Otoritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.
6. Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah.
7. Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai-nilai Transparantif, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender; (b) institusi representasi

dan deliberasi; dan (c) pertautan (engagement) antarpelaku di desa.

8. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada aset lokal.
9. Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal.
10. Dana Alokasi Desa dari pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa.
11. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal.
12. Satu desa, satu rencana, satu anggaran.
13. Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

#### **b. Tolak Ukur Desa Membangun**

Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Paradigma lama mengenai pembangunan desa bersifat *state centric: otokratis, top down*,

*sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya.* Sedangkan paradigma baru desa membangun mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoris dan seterusnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur desa membangun menurut Eko (2014:37), diantaranya ialah:

1. Pertumbuhan desa yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Adanya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan
3. Menonjolkan nilai-nilai kebebasan
4. Menghargai adanya kearifan lokal desa
5. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh
6. Negara hanya berperan menciptakan kerangka legal yg kondusif, dan mendorong institusi lokal untuk tumbuh dan mandiri

Desa membangun merupakan upaya guna menuju kesejahteraan melalui prakarsa serta sumber daya yang dimiliki oleh lokal sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan bersama. Desa membangun diperlukan guna menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan tetap menjunjung nilai, budaya dan karakteristik Desa.

Selain itu, desa membangun tidak hanya bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan seperti konsep pembangunan desa, namun menjadikan desa sebagai basis penghidupan masyarakat secara kontinu dan membangun desa yang mandiri. Tidak melulu hanya sebatas objek, tapi desa membangun harus sudah bergerak sebagaimana subjek dimana secara hirarki pemerintahan, pemerintah yang ada tidak ikut campur dalam melakukan pembangunan, atau dengan kata lain adalah murni karena adanya prakarsa lokal. Sebagaimana mengetahui kebutuhan seseorang tidaklah berdasarkan analisis orang lain saja, melainkan dari sudut pandang seseorang itu sendiri. Begitu juga dengan desa membangun, hanya masyarakat itu sendiri yang mengerti apa yang mereka butuhkan dan strategi apa yang dibutuhkan.

#### **4. Partisipasi**

##### **a. Partisipasi Masyarakat**

Makna dasar dari partisipasi adalah “proses berbagi dan mengambil bagian dari...”. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat mengambil bagian didalamnya. Partisipasi merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan.

Melalui proses ini berbagai pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol disaat merumuskan inisiatif- inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan, dan tatkala menentukan sumber daya yang nantinya bisa mempengaruhi mereka (*World Bank 1996*).

Pemaknaan ide partisipasi sebenarnya sangat luas dan beragam. Partisipasi bisa dipahami sebagai prinsip, proses, maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan propublik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, partisipasi bisa merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena imbas langsung oleh kebijakan publik (*International IDEA 2002*).

Dalam (*Monograph Politics dan Government Menuju Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik; 2009*) terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi partisipasi, antara lain:\

## 1. Unsur Partisipasi

### a) Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokrasi. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberi suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab konsep keadilan demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep “penyertaan” (inclusion).

### b) Keterlibatan

Bila ingin mengembangkan partisipasi dalam proses kebijakan maka adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Sebab pada dasarnya, yang menjadi kekhawatiran utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri. Bila masalah itu adalah masalah publik maka publik pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya (London 1997).

## 2. Syarat Partisipasi

### a. Keleluasaan

Partisipasi tidak akan dapat berjalan bila tidak ada keleluasaan atau tidak ada ruang yang diberikan. Ada dua ruang diranah sosial dan politik yang harus dibuka secara leluasa, yaitu:

#### - Ruang Politik

Pemerintah desa harus mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu memkapasitas proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang secara optimal.

#### - Ruang Sosial

Partisipasi hanya bisa berjalan baik bila struktur yang ada didalam masyarakat bersifat egaliter. Bila dalam struktur sosial masyarakat masih kental dengan nuansa patron-klien dan sangat elitis maka proses pembuatan keputusan tidak akan mungkin bersifat partisipatif.



b. Kesiediaan dan Kepercayaan

Partisipasi hanya akan berlangsung bila ada kesiediaan dari kedua belah pihak baik pemerintah desa maupun warga masyarakat. Tanpa adanya kesiediaan pemerintah daerah maka partisipasi tidak mungkin dijalankan karena pintu artikulasi kepentingan akan tertutup rapat. Kalau kondisi ini dibiarkan bersemai maka akan ada kecenderungan didalam masyarakat untuk menggunakan mekanisme-mekanisme yang tak terorganisir dan anarkis untuk mengartikulasikan setiap hasrat publik mereka. Di sisi lain, masyarakat pun dituntut untuk bersedia lebih jauh dalam proses kebijakan yang ada. masyarakat mesti bersedia untuk melepas egoism mereka agar nilai-nilai partisipasi bisa terinternalisasikan.

Kesiediaan kedua belah pihak tersebut bisa dipupuk bila terjadi sikap saling percaya dan tidak ada kecuriaan antara pemerintah daerah dan warganya. Kepercayaan ini biasanya akan mudah disemai bila pihak yang memerintah semakin transparan dan bertanggung gugat (*accountable*)

dan pihak yang diperintah tidak dirugikan dan menerima informasi yang tidak dimanipulasi.

c. Kemampuan

Meskipun ada keleluasaan dan kesediaan, partisipasi juga menjadi sulit terwujud bila tidak ada kemampuan dari kedua belah pihak baik pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk mewujudkan nilai, prinsip dan mekanisme partisipasi secara nyata dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan alat, metode interaksi dan keahlian yang akan menjadi sarana dan prasarana penting agar proses partisipasi dapat berlangsung secara efektif (Tamrin dan Wijayanti, 2006).

### **3. Tahapan Partisipasi**

Partisipasi merupakan sebuah rangkaian panjang yang ditandai dengan aktivitas warga untuk mengidentifikasi keinginan mereka, menimbang pilihan yang mereka yakini dan melaksanakan keyakinan mereka. Biasanya proses partisipasi berlangsung melalui beberapa fase berikut ini (Wilox dan David, 1994).

a. Inisiasi

Merupakan tahapan yang paling awal biasanya ditandai dengan adanya keinginan warga untuk terlibat dan pemerintah sudah mulai memikirkan isu kebijakan apa yang mungkin akan melibatkan warga.

b. Persiapan

Dalam tahap ini pemerintah daerah sudah mulai bagaimana proses partisipasi dijalankan, mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan warganya serta memikirkan pendekatan partisipasi seperti apa yang paling efektif.

c. Partisipasi

Dalam fase ini pemerintah daerah menggunakan berbagai metode- metode partisipasi yang melibatkan warga.

d. Continuasi

Merupakan fase akhir dalam partisipasi. dalam fase ini pemerintah daerah lebih memfokuskan aktivitasnya pada upaya-upaya menjaga keberlangsungan proses partisipasi.

#### **4. Bentuk Partisipasi**

Keith Davis (Sastropetro, 2001:55)

mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi, sebagai berikut:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang ada diluar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu bentuk partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa itu sendiri.
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tahap ahli setempat, bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat setempat akan memperingankan pembangunan yang diselenggarakan didesa tersebut.
- f. Aksi masa.

- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
- h. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Simatupang (dalam Yuwono, 2001: 124)

memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara setanah air untuk membanun masa depan bersama.
- b) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam Negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan, partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-

cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

- d) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. keadilan sosial dan keadilan nasional yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

#### **b. Praktik Partisipasi Dalam Pembangunan**

Setiap warganegara, baik secara individu maupun kelompok mengekspresikan partisipasi mereka dalam proses kebijakan dengan karakter yang beragam. Keragaman tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana legitimasi pemerintah daerah di mata mereka dan basis nilai yang mereka miliki. Ada empat pola sikap partisipasi warga adalah sebagai berikut:

1. **Mendukung.** Warga cenderung cenderung bersikap kooperatif dan mendukung setiap gagasan atau kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Mereka cenderung untuk tidak mempertanyakan sedikitpun setiap program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mereka biasanya cenderung bersikap kolaboratif terutama dalam proses delivery program yang ada.

2. **Kritis.** Warga akan memilih keterlibatan kritis dengan tidak selalu mendukung atau menentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.
3. **Berseberangan.** Warga berposisi berseberangan dengan pemerintah daerah. Mereka bisa saja berperan sebagai counter part, watch dog atau whistle blower yang “berteriak” ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat yang mereka yakini.
4. **Absen.** Warga cenderung apatis dengan seluruh program pemerintah dan mengekspresikannya dalam bentuk “partisipasi negative”. Mereka memilih “berpartisipasi” dengan tidak berpartisipasi dalam program apapun.

Menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti : pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materi), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut jelas sekali bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna keberhasilan suatu pembangunan.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk melancarkan usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 4) Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Dalam kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang penting untuk ditekankan adalah mengkaji partisipasi dalam pembangunan dengan dilihat dari indikator unsur dan syarat partisipasi. Terjadi atau tidaknya partisipasi dapat dilihat dari praktek pelaksanaan unsur dan syarat partisipasi apakah sudah dilaksanakan secara penuh atau belum. Unsur dari partisipasi adalah keterwakilan dan keterlibatan serta syarat dari partisipasi adalah keleluasaan, kesediaan dan kepercayaan, serta kemampuan. Apabila syarat dan unsur dalam partisipasi sudah terlaksana sepenuhnya



berarti partisipasi tersebut benar adanya namun sebaliknya apabila unsur dan syarat tersebut tidak terlaksana atau belum terlaksana sepenuhnya berarti partisipasi juga belum terlaksana secara maksimal.

## **H. Kerangka Pikir**

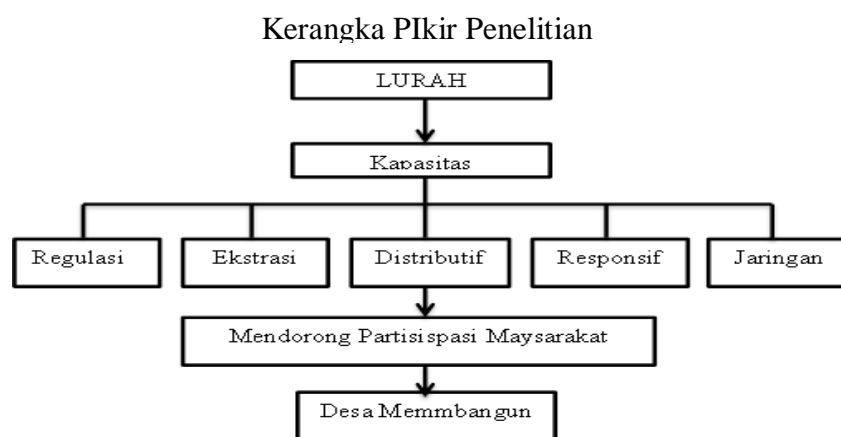
Secara konseptual, *Governabilty* yang diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memerintah sesuai regulasi dan pelayanan. Adanya regulasi yang mengatur menjadikan pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktifitas dan efesiensi di dalam masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Kewenangan yang dimiliki desa dipergunakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dikelola secara efektif atau yang timbul dari pembangunan desa dan prakarsa masyarakat desa. salah satunya dalam partisipasi pembangunan, Desa memiliki kewenangan untuk “mengurus” dan “mengatur”. Dan dalam mengatur dan mengurus partisipasi dalam pembangunan tentu pemerintah desa memerlukan kapasitas untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Penelitian ini hendak mengkaji kapasitas pemerintah desa melalui perspektf *governability* yang dilihat dari kewenangan desa dalam hal mengatur dan mengurus.. Sehingga lebih fokus terhadap bagaimana kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa

membangun di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat mencakup 5 (lima) indikator kapasitas yaitu Kapasitas Regulasi, Kapasitas Ekstrasi, Kapasitas Distributif, Kapasitas Responsif, dan Kapasitas Jaringan.

**Gambar 1. 1**



*Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2023*

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (1998) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian berbasis makna dan metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Metode ini digunakan untuk mengecek status subjek keilmuan, peneliti utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat spontan, induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini menekankan generalisasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan suatu kondisi, fenomena, masalah atau peristiwa. Dalam penelitian deskriptif, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan situasi, kondisi atau fenomena yang terjadi guna memberikan informasi secara umum tentang subjek yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh terkait Kapasitas Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam desa membangun dengan melihat dari perspektif *governability*.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pihak- pihak yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian yang meliputi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah kapasitas Lurah. Melihat dari kewenangan kalurahan yaitu mengatur dan mengurus serta melayani, kemudian mengkaji terkait bagaimana kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun,\

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**d. Informan**

Informan atau narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah orang-orang yang mengetahui serta dapat menjelaskan tentang kapasitas pemerintah kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2016:218-219) mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Informan sebagai data primer dalam penelitian ini dianggap paling tahu mengenai kapasitas Pemerintah

Kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun yang terdiri atas 7 informan. 5 (lima) informan berasal dari pemerintah kalurahan yang terdiri atas (Lurah, Ulu-ulu, kamituwa, Kaur Pangripta dan Jagabaya), kelima informan tersebut menjawab atas kapasitas seperti apa yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan termasuk faktor pendukung, kendala, pelaksanaan partisipasi dan dampak terhadap pembangunan desa. Kemudian ada 2 (dua) informan yang berasal dari tokoh masyarakat. Informan tersebut menjadi pilihan dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui realisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti apa. Informan tersebut dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

## Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Pendidikan	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji, S.IP.	S1	Lurah
2.	Murgiyanta,SE.	S1	Ulu-ulu (Kasi Kesejahteraan))
3.	Rusmanto Wagiman,S.H.	S1	Jagabaya (Kasi Pemerintahan)
4.	Al Thouvik Sofisalam, Amd.	D3	Kamituwa (Kasi Pelayanan)
5.	Wahyu Nurendra	SMK	Kaur Pangripta (Kaur Perencanaan)
6.	Ribut Suparman, Amd.	D3	Tokoh Masyarakat
7.	Tri Setiawan, S.Hum.	S1	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2023*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian berasal dari sumber data (subjek dan sampel). Teknik pengumpulan data diperlukan karena teknik pengumpulan data inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun suatu instrumen penelitian. Kristanto berpendapat bahwa instrumen penelitian menjadi seperangkat alat yang dipergunakan untuk membantu peneliti dalam pengumpulan data.

a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data melalui peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Supardi dalam definisinya bahwa Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang akan diteliti. Objek observasi dalam penelitian ini adalah kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun. Observasi yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke kantor kalurahan dan pengamatan melalui media internet.

b. Wawancara

Supardi berpendapat bahwa metode wawancara adalah proses tanya jawab penelitian secara lisan dimana dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan informasi atau berbicara secara langsung. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari pewawancara kepada terwawancara dan jawaban dari terwawancara direkam atau difilmkan. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

c. Dokumen

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi berupa buku, catatan, dokumen, figur tertulis dan visual berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Dokumen dipergunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang kemudian akan dianalisa oleh peneliti. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan data dokumentasi yaitu RPJMKal, Profil Kelurahan, Foto, dan rekaman audio.



**Tabel 1. 2**

## Ringkasan Teknik Pengumpulan Data

<b>Teknik Pengumpulan</b>	<b>Cara Mengumpulkan</b>	<b>Sasaran Pengumpulan Data</b>
Dokumen	Cara mengumpulkan data melalui dokumen dapat dilakukan melalui dokumen berupa RPJMKal, Jurnal, Buku, Dll	Dokumen dapat diperoleh baik melalui Pemerintah Kalurahan, maupun dari internet. Dari pemerintah kalurahan seperti dokumen RPJMKal dan profil kalurahan, sedangkan untuk buku dan jurnal dapat diperoleh di perpustakaan ataupun di internet.
Wawancara	Cara mendapatkan data wawancara dilakukan melalui offline dan turun secara langsung di lapangan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan.	Sasaran dari wawancara yaitu Lurah, Pamong Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
Observasi	Cara mendapatkan data melalui observasi dilakukan dengan mengamati yang terjadi di lapangan baik temuan dalam bentuk gambar/foto, ataupun berupa suara. Serta dengan melakukan observasi melalui pengamatan dari sumber online	Sasaran dari observasi yaitu Lurah, Pamong Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.

*Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2023*

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasi data dan memilih yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisa. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

##### **b. Penyajian Data**

Penyajian data ialah proses data atas hasil penelitian di lapangan yang tujuannya menjawab permasalahan yang ada. Pada penyajian data ini, disajikan dalam bentuk kualitatif berupa teks naratif yang mudah dibaca serta dipahami.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap verifikasi ini, tertuju pada pemikiran singkat dari peneliti pada saat melakukan penelitian. Tahap ini menjelaskan ulang secara singkat data yang didapat pada saat observasi sebagai atau penarikan kesimpulan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**

#### **A. Sejarah Kalurahan Condongcatur**

Kalurahan Condongcatur terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Condongcatur berasal dari kata Condong yang berarti ngumpul dan Catur yang berarti 4 (empat). Awalnya pada tahun 1946, Kalurahan Condongcatur merupakan gabungan dari 4 kalurahan yaitu kalurahan Manukan, Gejayan, Gorongan dan Kentungan.

Gabungan 4 (empat) Kalurahan didasarkan pada Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan Tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan yang kemudian dinamai dengan CONDONGCATUR. Dari masing-masing kalurahan sebelumnya dipimpin oleh masing-masing pemimpin yaitu:

1. Kalurahan Manukan dipimpin oleh Bapak Jayeng sumarto.
2. Kalurahan Gorongan dipimpin oleh Bapak Rng.Hadi Prasojo.
3. Kalurahan Gejayan dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo.
4. Kalurahan Kentungan dipimpin oleh Bapak Kromoredjo.

Kalurahan Condongcatur berdiri pada 26 Desember 1946 dengan lurah yang menjabat adalah Bapak Kromo Redjo. Selanjutnya diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jabatan lurah diganti menjadi Kepala Desa sesuai dengan yang termuat dalam keputusan

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KPTS/1986 pada 12 Agustus 1986. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sehingga Jabatan Kepala desa diganti menjadi Lurah.

Kalurahan Condongcatur dari masa ke masa mengalami pergantian pimpinan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 1946 sampai dengan Tahun 1984 dipimpin oleh Bapak Kromo Redjo.
- 2) Pada Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1995 dipimpin oleh Bapak H.Kuwat Hadi Cusnanto.
- 3) Pada Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2009 dipimpin oleh Bapak H.Sukris.
- 4) Pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 dipimpin oleh Bapak Marsudi.
- 5) Pada Tahun 2015 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Bapak Reno candra sangaji, S.IP

## B. Keadaan Geografis

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi : Luas wilayah, Batas wilayah dan Orbitasi.

### 1. Luas Wilayah

Kalurahan Condongcatur merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan luas wilayah  $\pm$  950.000 Ha.

**Tabel 2. 1**

Luas Wilayah Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Sawah	246.4305 Ha
2.	Pekarangan	593.6339 Ha
3.	Tegal/.Ladang	3165 Ha
4.	Embung/Kolam	6565 Ha
5.	Lain-lain	9626 Ha

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kalurahan Condongcatur memiliki wilayah yang terhitung luas. Sebagai salah satu kalurahan yang terletak di perkotaan, kalurahan Condongcatur memiliki pekarangan yang luas yaitu 593.6339 Ha dan menjadi paling banyak mengambil bagian dalam luas kalurahan condongcatur. Dan jika dibandingkan dengan daerah persawahan

masih terhitung lebih luas pekarangan dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat bekerja swasta.

Kalurahan Condongcatur berada dalam ketinggian dari permukaan laut yaitu  $\pm 250$  M dengan tipikal permukaan yang termasuk dalam dataran rendah. Curah hujan rata-rata 2.500–3.000 mm dengan suhu udara sekitar 26°C sampai dengan 32° C.

## **2. Batas Wilayah**

Wilayah Kalurahan Condongcatur secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah disekitarnya baik dari sisi timur, barat, selatan dan timur.

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik.
- b. Sebelah Timu : Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.
- c. Sebelah Selatan: Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.
- d. Sebelah Barat : Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

Kalurahan Condongcatur merupakan wilayah yang terletak dipertengahan diantara beberapa wilayah. Dari sisi sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik. Sedangkan dari sisi sebelah timur dan selatan masih berada dalam kapanewon yang sama yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Maguwoharjo dan sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Caturtunggal. Keduanya masih berada dalam lingkung

Kapanewon Depok. Dan berbeda dengan dari sisi sebelah barat yang bersebelahan dengan Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

### **3. Jarak Orbitasi**

Letak Kalurahan Condongcatur dengan pusat pemerintahan yang memiliki peranan penting bagi arah pembangunan seperti berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 0,4 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 8,5 km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 7,1 km
- d. Jarak dari Pusat pemerintahan Negara : 536 km

Berdasarkan orbitasi diketahui bahwa Jarak dari Kalurahan Condongcatur ke pusat Pemerintahan Kapanewon berjarak 0,4 Km. Jarak dari Kalurahan Condongcatur ke pusat pemerintahan Kabupaten berjarak 8,5 Km. Jarak dari Kalurahan Condongcatur ke pusat pemerintahan Provinsi berjarak 7,1 Km, dan jarak dari Kalurahan Condongcatur ke pusat pemerintahan Negara berjarak 536 Km.





## 1. Kependudukan Kalurahan Condongcatur

Berdasarkan data yang diperoleh dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Condongcatur (RPJMKal), jumlah penduduk dapat dilihat dalam berbagai macam kategori diantaranya sebagai berikut:

### a) Data Penduduk menurut jenis kelamin

Pada dasarnya manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya merupakan jenis makhluk hidup yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Dan di setiap wilayah tentunya memiliki penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Salah satunya di Kalurahan Condongcatur yang ditinggali oleh penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang tidak sama. Untuk mengetahui berapa banyak kategori penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kalurahan Condongcatur dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 2**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kalurahan Condongcatur

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	26.137 jiwa
2.	Perempuan	22.747 jiwa
JUMLAH		48.884 jiwa

*Sumber: Data Ptofil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur berdasar kategori jenis kelamin dikatakan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 26.137 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan perbandingannya cukup jauh sebesar 3.390 jiwa. Kalurahan Condongcatur juga memiliki total Kepala Keluarga yang terbilang banyak yaitu sebesar 17.842 Kepala Keluarga.

b) Data Penduduk menurut Kewarganegaraan WNA

Dalam era globalisasi yang semakin maju membuat Negara menjalin kerjasama dengan pihak luar Negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lainnya. Sehingga dengan mudah Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Indonesia baik untuk tinggal menetap, bekerja, penelitian, wisata, sekolah ataupun kuliah. WNA dimaknai dengan warga Negara asing yang bertempat tinggal di suatu

Negara tertentu tetapi bukan warga Negara dari Negara tersebut. Seperti di Kalurahan Condongcatur yang terdapat WNA bertempat tinggal. Jumlah WNA yang tinggal di Kalurahan Condongcatur dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 3**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan WNA

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	5 jiwa
2.	Perempuan	3 jiwa
JUMLAH		8 jiwa

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa di Kalurahan Condongcatur selain memiliki penduduk berkewarganegaraan Indonesia juga turut terdapat penduduk yang berkewarganegaraan asing. Penduduk WNA yang berjenis kelamin laki-laki di Kalurahan Condongcatur terdapat 5 jiwa, sedangkan untuk penduduk WNA yang berjenis kelamin perempuan terdapat 3 jiwa. Maka penduduk WNA DI Kalurahan Condongcatur terdapat 8 jiwa.

c) Data Penduduk Menurut Agama

Penduduk menurut agama menjadi informasi tentang jumlah penduduk yang didasarkan pada agama yang mana diperlukan untuk membantu merancang suatu program yang

berhubungan dengan umat beragama. Kalurahan Condongcatur adalah salah satu wilayah yang mempunyai penduduk dengan beraneka ragam jenis agama. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	42.573 jiwa
2.	Kristen	3.161 jiwa
3.	Katolik	2.873 jiwa
4.	Hindu	139 jiwa
5.	Budha	137 jiwa
6.	Penganut/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 jiwa
JUMLAH		48.884 jiwa

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan data tabel diatas dapat diuraikan bahwa penduduk Kalurahan Condongcatur mayoritas menganut agama islam yang sebesar 42.573 jiwa. Namun, penduduk yang beragama Kristen dan Katolik terbilang cukup banyak. Penganut agama Kristen sebesar 3.161 jiwa dan penganut agama Katholik sebesar 2.873 jiwa. Dan sisanya penganut agama hindu dan budha yang mana keduanya hanya selisih 2 jiwa. Untuk penganut agama hindu sebesar 139 jiwa,

sedangkan penganut agama budha sebesar 137 jiwa. Di Kalurahan Condngcatur juga memiliki penduduk yang menjadi penganut atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan sebesar 1 jiwa. Dari bervariasinya agama penduduk menunjukkan bahwa di Kalurahan Codnongcatur berifat heterogen atau bervariasi.

d) Data Penduduk Menurut Usia

Kalurahan Condongcatur memiliki penduduk dengan rentan usia yang berbeda-beda. Dalam rentan usia yang ada kemudian dikalsifikasin kedalam kategori yang berbeda seperti anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Suatu kewajaran apabila di setiap wilayah memiliki penduduk dengan usia yang berbeda dikarenakan wilayah itu sendiri yang menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya manusia. Data penduduk berdasarkan usia di Kalurahan Condongcatur dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 5****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1.	00-04 Tahun	322 Jiwa
2.	05-09 Tahun	2.943 Jiwa
3.	10-14 Tahun	3.478 Jiwa
4.	15-19 Tahun	3.821 Jiwa
5.	20-24 Tahun	3.184 Jiwa
6.	25-29 Tahun	3.057 Jiwa
7.	30-34 Tahun	4.047 Jiwa
8.	35-39 Tahun	5.012 Jiwa
9.	40-44 Tahun	4.208 Jiwa
10.	45-49 Tahun	4.012 Jiwa
11.	50-54 Tahun	3.446 Jiwa
12.	55-59 Tahun	2.941 Jiwa
13.	60- keatas	8.413 Jiwa
JUMLAH		48.884 Jiwa

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Dari data tabel diatas menyatakan bahwa penduduk Kalurahan Condongcatur memiliki jumlah penduduk lansia yang terbilang lebih dominan banyak dibandingkan lainnya dengan rentang usia 60 Tahun keatas. Namun kategori dewasa dengan rentng usia 25 keatas apabila dijumlahkan juga mnecakup jumlah yang banyak sehingga dapat dinyatakan

bahwa penduduk Kalurahan Condongcatur mayoritas dihuni oleh kalangan orang-orang dewasa.

e) Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi suatu tahapan bagi manusia untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Belajar yang dimaksud bukan hanya dapat ditempuh dalam bentuk pendidikan umum akan tetapi pendidikan khusus juga turut banyak diminati di kalangan masyarakat. Seperti halnya di Kalurahan Condongcatur yang sudah banyak masyarakatnya menempuh pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus.

Tabel dibawah menunjukkan data penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di Kalurahan Condongcatur. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat SLTA mempunyai jumlah paling dominan diantara jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang lain. Selain mempunyai tamatan SLTA paling dominan, Kalurahan Condongcatur juga menjadi Kalurahan yang mempunyai tamatan sarjana yang cukup banyak. Maka dapat disebutkan bahwa Kalurahan mempunyai potensi sumber daya manusia yang cukup baik apabila dilihat dari tingkat pendidikan. Dengan berkembangnya zaman yang mana pendidikan menjadi salah satu kunci



keberhasilan kemajuan maka sekarang ini sudah banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengemban pendidikan.

**Tabel 2. 6**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (jiwa)
<b>Pendidikan Umum</b>		
1.	Belum Sekolah	8.489 jiwa
2.	Taman Kanak-Kanak	3.489 jiwa
3.	Sekolah Dasar	4.204 jiwa
4.	SLTP	4.499 jiwa
5.	SLTA	14.942 jiwa
6.	Diploma	664 jiwa
7.	Akademi	2.569 jiwa
8.	Strata 1	7.973 jiwa
9.	Strata 2	1.295 jiwa
20.	Strata 3	319 jiwa
<b>Pendidikan Khusus</b>		
1.	Pondok Pesantren	38 jiwa
2.	Pendidikan Keagamaan	-
3.	Sekolah Luar Biasa	10 jiwa
4.	Kursus/Ketrampilan	25 jiwa
Tidak Sekolah		368 jiwa
Total		48.884 jiwa

*Sumber: Data Profil kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

#### **D. Keadaan Sosial Ekonomi**

Kalurahan Condongcatur merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi Sumber Daya Manusia dengan menjadi central Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Kalurahan ini turut menjadi wilayah yang dihuni oleh penduduk yang bersifat heterogen dengan variasi suku bangsa yang hidup dengan damai.

Keadaan sosial yang ada di Kalurahan Condongcatur terbilang baik dengan adanya interaksi sosial antar sesama warga. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kelompok-kelompok kesenian baik kesenian religious, tradisional dan kesenian modern. Dalam melestarikan kesenian tersebut bahkan diminati dari mulai anak-anak hingga dewasa yang memiliki rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong dan hadir dalam rapat yang melibatkan masyarakat.

Untuk keadaan ekonomi dan mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur terbilang baik dilihat dari potensi wilayah yang memadai. Dimana dengan lokasi yang cukup terbilang strategis memungkinkan untuk menciptakan peluang mata pencaharian yang cukup. Maka untuk wilayah condongcatur untuk mata pencaharian lebih dominan ke dalam bidang berdagang atau penjual jasa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, mata pencaharian penduduk Kalurahan Condongcatur bervariasi. Berikut data jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur:

**Tabel 2. 7**

## Jenis Mata Pencaharian Kalurahan Condongcatur

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.953 jiwa
2.	TNI	985 jiwa
3.	Polri	213 jiwa
4.	Pedagang	2.690 jiwa
5.	Petani/Perkebun	238 jiwa
6.	Peternak	10 jiwa
7.	Industri	69 jiwa
8.	Konstruksi	103 jiwa
9.	Transportsi	43 jiwa
10.	Karyawan Swasta	7.459 jiwa
11.	Karyawan BUMN	318 jiwa
12.	Karyawan BUMD	50 jiwa
13.	Karyawan Honorer	116 jiwa
14.	Buruh Harian Lepas	1.504 jiwa
15.	Buruh Tani/Perkebunan	206 jiwa
16.	Buruh Nelayan/Perikanan	1 jiwa
17.	Buruh Peternakan	7 jiwa
18.	Pengurus Rumah Tangga	47 jiwa
19.	Tukang Cukur	3 jiwa
20.	Tukang Listrik	10 jiwa
21.	Tukang Las	26 jiwa
22.	Tukang jahit	61 jiwa
23.	Tukang kayu	32 jiwa
24.	Tukang Sol Sepatu	2 jiwa
25.	Penata Rias	10 jiwa

26.	Penata Busana	7 jiwa
27.	Penata Rambut	10 jiwa
28.	Mekanik	48 jiwa
29.	Seniman	41 jiwa
30.	Tabib	1 jiwa
31.	Perancang Busana	5 jiwa
32.	Penerjemah	2 jiwa
33.	Pendeta	9 jiwa
34.	Pastor	22 jiwa
35.	Ustad.Mubaliq	5 jiwa
36.	Wartawan	31 jiwa
37.	Juru Masak	9 jiwa
38.	Dosen	495 jiwa
39.	Guru	465 jiwa
40.	Pengacara	29 jiwa
41.	Notaris	14 jiwa
42.	Arsitek	37 jiwa
43.	Akuntan	5 jiwa
44.	Konsultan	26 jiwa
45.	Dokterr	234 jiwa
46.	Bidan	11 jiwa
47.	Perawat	71 jiwa
48.	Wiraswasta	4.751 jiwa
49.	Lain-lain	1.365 jiwa

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan data tabel diatas, menyajikan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur. Beragam

macam mata pencaharian tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Mengacu pada data diatas, mata pencaharian penduduk Kalurahan Condongcatur dominan lebih banyak bekerja pada sektor swasta dan atau pada bidang jasa. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi Kalurahan yang cukup strategis.

Dalam konteks ini, mata pencaharian sebagai pedagang di Kalurahan Condongcatur juga terbilang banyak yang mana dengan didukungnya wilayah yang terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang memicu hadirnya pendatang ke lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga turut memberikan dukungan kepada para pedagang sehingga dapat membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

## **E. Keadaan Sarana dan Prasarana**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan sebagai hal penting bagi kemajuan bangsa dan Negara menjadikan setiap wilayah memberikan fasilitas untuk menyongsongnya. Terutama di Kaluraha Condongcatur yang memiliki beberapa jenis fasilitas pendidikan. Berikut data jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan condongcatur:

**Tabel 2. 8**

Jumlah Fasilitas Pendidikn Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Kelompok Bermain	20
2.	Taman Kanak-Kanak	18
3.	Sekolah Dasar	15
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3
6.	Perguruan Tinggi	5
7.	SLBC	1
8.	Pondok Pesantren	5
Total		72

Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Thaun2023

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang terdapat di Kalurahan Condongcatur terdapat total 72 unit yang terdiri dari berbagai macam jenis seperti Kelompok Bermain terdapat 20 unit, Taman Kanak-Kanak terdapat 18 unit, Sekolah Dasar terdapat 15 unit, Sekolah Mennengah Pertama (SMP) terdapat 5 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 3 unit, Perguruan Tinggi terdapat 5 unit, SLBC terdapat 1 unit dan Pondok Pesantren terdapat 5 unit. Dengan adanya fasilitas pendidikan menjadikan penduduk Kalurahan Condongcatur dapat meraih pendidikan yang memadai.

## 2. Peribadatan

Fasilitas ibadah adalah hal yang penting dimiliki untuk setiap wilayah untuk penduduk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kalurahan Condongcatur dengan kondisi penduduk yang memiliki ragam variasi agama tentu turut memiliki beberapa fasilitas peribadatan yang berbeda. Berikut data jumlah fasilitas peribadatan Kalurahan Condongcatur:

**Tabel 2. 9**

### Jenis Fasilitas Peribadatan

No.	Jenis Fasilitas Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	83
2.	Mushola	20
3.	Gereja Kristen	2
4.	Gereja katolik	4
5.	Kapela Katolik	3
6.	Kuil	-
7.	Pura	1
Total		113

*Sumber: Data Profil kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas peribadatan yang ada di Kalurahan Condongatur sejumlah 113 unit yang dirincikan sebagai berikut Masjid terdapat 83 unit, Mushla 20 unit, Gereja Kristen 2 unit, Gereja Katolik terdapat 4 unit, Kapela Katolik terdapat 3 unit, dan Pura terdapat 1 unit. Namun, untuk

kuil Kalurahan Condongcatur belum memkapasitasnya. Dengan adanya fasilitas peribadatan tentu mempermudah untuk kaum beragama melaksanakan ibadahnyadengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

### 3. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan sehari-hari yang mana menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Seperti halnya di Kalurahan Condongcatur yang menyongsong kesehatan masyarakatnya dengan memberikan beberapa fasilitas kesehatan guna mempermudah masyarakat mengakses kesehatan. Berikut data jumlah fasilitas kesehatan Kalurahan Condongcatur:

**Tabel 2. 10**

Jumlah Fasilitas kesehatan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1.	Rumah Sakit	2
2.	Rumah Bersalin/BKIA	12
3.	PUSKESMAS/Pembantu	1
4.	PUSKESMAS	1
5.	Apotek/Depo Obat	16
6.	Dokter Praktek	52
7.	Bidan	10
Total		103

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*



Berdasarkan data diatas, dapat dinyatakan bahwa di Kalurahan Condongcatur terdapat beberapa fasilitas kesehatan antara lain Rumah Sakit terdapat 2 unit, Rumah Bersalin/BKIA terdapat 12 unit, PUSKESMAS terdapat 1 unit, PUSKESMAS/Pembantu terdapat 1 unit, Apotek/Depo Obat terdapat 16 unit, Dokter Praktek terdapat 52 unit, dan Bidan terdapat 10 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan yang terdapat di Kalurahan Condongcatur sejumlah 103 unit dengan berbagai macam jenisnya.

Fasilitas kesehatan yang tersedia dapat membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan baik hanya membeli obat-obatan ataupun melakukan pemeriksaan sehingga mempermudah masyarakat untuk terus memperhatikan kesehatan dan diharapkan dapat menjaga kesehatan.

#### 4. Perekonomian

Terdapat beberapa macam fasilitas untuk menyongsong perekonomian yang ada di Kalurahan Condongcatur. Fasilitas yang ada menjadi hal penting untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. Berikut data jumlah fasilitas perekonomia Kalurahan Condongcatur.

**Tabel 2. 11**

**Jumlah Fasilitas Perekonomian Kalurahan Conndongcatur**

No.	Jenis Fasilitas Perekonomian	Jumlah (unit)
1.	Pasar Umum	2
2.	Koperasi Simpan Pinjam	11
3.	KUD	1
4.	Toko	260
5.	Warung	557
6.	Bank	5
7.	Badan-Badan Kredit	9
Total		845

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023*

Berdasarkan data tersebut, terdapat 845 unit fasilitas perekonomian anatar lain Pasar Umum terdapat 2 unit, Koperasi Simpan Pinjam terdapat 11 unit, KUD terdapat 1 unit, Toko terdapat 260 unit, Warung terdapat 557 unit, Bank terdapat 5 unit, dan Badan-Badan Kredit terdapat 9 unit. Dari berbagai macam fasilitas perekonomian tersebut merupakan dukungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasar umum sebagai tempat jual beli yang mana terdapat aktivitas ekonomi didalamnya serta membantu masyarakat untuk memiliki mata pencaharian. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu dukunga bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan dukungan keuangan untuk masyarakat. Sama halnya dengan Bank dan Badan-Badan Kredit sebagai pihak pemberi layanan bantuan keuangan.

## **F. Lembaga Pemerintahan**

### 1. Visi

“Terwujudnya Kalurahan Condongcatur Yang Lebih Maju, Bermanfaat, Dan Pelayanan Prima Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat”

### 2. Misi

- 1) Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis IT.
- 2) Mempertahankan kesejahteraan dan kinerja pamong kalurahan beserta staff kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan.
- 3) Mempertahankan Transparantif dan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan.
- 4) Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (Transparantif ).
- 5) Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik kalurahan / polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

- 7) Mendorong peran perempuan dimasyarakat dalam rangka realisasi pengarusutamaan gender (pug).
- 8) Optimalisasi lembaga kemasyarakatan kalurahan (pkk, karang taruna,rt/rw, lpmk, posyandu)
- 9) Pengembangan kampung kb, ramah anak, rth dan padukuhan bersinar
- 10) Pemberian ruang dan fasilitas disabilitas
- 11) Meningkatkan dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggung jawab
- 12) Optimalisasi keamanan lingkungan melalui linmas dan kelompok jaga warga
- 13) Merealisasikan badan usaha milik desa (bumdes)  
Penyampaian bantuan pembangunan kepada 64 rw di 18 padukuhan sebesar rp. 40.000.000. Per tahun
- 14) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima.
- 15) Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan spiritual dan adat istiadat secara mandiri.

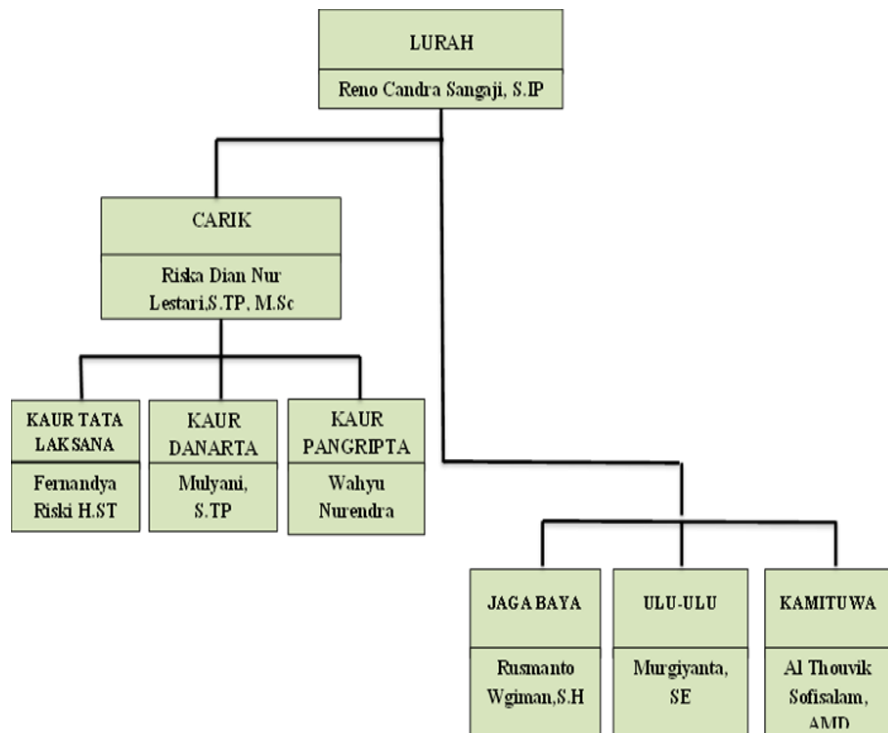
### 3. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan No. 2 .9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahahan, Kalurahan Condongcatur adalah desa di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur.

**Gambar 2.2**

Bagan Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur



*Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2023*

Kalurahan Condongcatur selain memiliki pengurus inti tidak lain turut memiliki banyak anggota pamong yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut daftar pamong/perangkat di kalurahan Condongcatur:

**Tabel 2. 12**

## Daftar Pamong Kalurahan Condongcatur

No.	Jabatan	Nama
1.	Lurah	Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP
2.	Carik	Riska Dian Nur Lestari, S.TP, M.Sc.
3.	Jagabaya	Rusmanto Wagiman, S.H.
4.	Ulu-Ulu	Murgiyanta, SE.
5.	Kamituwa	Al Thouvik Sofisalam, Amd.
6.	Kaur. Danarta	Kosong
7.	Kaur. Pangripta	Wahyu Nurendra
8.	Kaur. Tata Laksana	Fernandya Riski Hartantri, ST.
9.	Dukuh Tiyasan	Suratman
10.	Dukuh Manukan	Beti Kartiningrum, ST MT.
11.	Dukuh Pondok	Irfani Reza Pahlevi, S. Pd.M.Pd.
12.	Dukuh Sanggrahan	Suparman
13.	Dukuh Gempol	Ari Susanti, ST.
14.	Dukuh Dero	Ribut Suparman, Amd.
15.	Dukuh Ngrigin	Muji Purwanto, Amd.
16.	Dukuh Ngeropoh	Drs.Mujiyono.
17.	Dukuh Dabag	H.A. S unaryo.
18.	Dukuh Gajeyan	H.Nuryanto. S. Pd.
19.	Dukuh Kaliwaru	Widiatmoko
20.	Dukuh Soropadan	Salahudin Kamal, S.Pd.
21.	Dukuh Priwulung	Sahid Fahrudin
22.	Dukuh Kayen	Purwanto
23.	Dukuh Kentungan	Suhartini
24.	Dukuh Pikgondang	Tri Setiawan, S.Hum.
25.	Dukuh Gandok	Supriyono Atmojo

26.	Dukuh Joho	Retnaningsih
27.	Staf Carik	Wasana, SH.
28.	Staf Pangripta	Apri Nugroho, S.I.P.
29.	Staf Danarta	Eko Kadaryanto, SE.
30.	Staf Danarta	Erna Setyaningsih H. S.Pdi.
31.	Staf Tatalaksana	Sudarna, BA
32.	Staf Tatalaksana	Marsana
33.	Staf Tatalaksana	Surono
34.	Staf Tatalaksana	Ririn Adriana, A.Md.Ak.
35.	Staf Tatalaksana	Tri Sugiyatno
36.	Staf Tatalaksana	Nedia Erlina
37.	Staf Tatalaksana	Amalia Dah Ayu Kiranti, ST.
38.	Staf Jagabaya	H.A.Trisusetiyanto, SIP.
39.	Staf Jagabaya	Heri Supriyono
40.	Staf Jagabaya	Rudi Antariksawan
41.	Staf Ulu-Ulu	Heri Sunanta
42.	Staf Ulu-Ulu	Felicita Erna Gista
43.	Staf Ulu-Ulu	Wanda Wira Sahputra, SE.
44.	Staf Kamituwa	Nur Amalina Dwi Astuti, S.Si.
45.	Staf Kamituwa	Candra Widiatoro, Amd.

*Sumber: Data Kalurahan Condongcatr Tahun 2023*

Berdasarkan daftar nama pamong Kalurahan menyatakan bahwa Kalurahan Condongcatr memiliki pamong yang lengkap seperti wilayah lainnya. Pamong tersebut yang akan membantu menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat. Seperti halnya para dukuh di setiap padukuhan yang diberi tugas menampung aspirasi masyarakat guna di laporkan ke tingkatan

yang lebih tinggi yaitu pada musyawarah lingkup se-kalurahan. Dari semua pamong sama pentingnya memiliki peran dalam mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memberikan dorongan dan arahan untuk terus menarik masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kalurahan guna mencapai desa membangun.

Jumlah padukuhan di Kalurahan Condongcatur turut terbilang banyak dengan masing-masing dukuh yang memimpin. Terdapat 18 padukuhan yang memenuhi wilayah Kalurahan Codnongcatur sebagai berikut rinciannya:

Berdasarkan data dibawah, terdapat 18 padukuhan dengan rincian 64 RW dan 211 RT. Dari banyaknya jumlah RW dan RT menunjukkan bahwa wilayah Kalurahan Condongcatur termasuk dalam kategori penduduk yang padat. Serta dengan jumlah 18 padukuhan menjadikan Kalurahan Condongcatur menjadi wilayah yang terbilang luas. Dan hampir semua padukuhan terletak di pemukiman perkotaan yang lokaisnya terbilang cukup strategis



**Tabel 2. 13**

## Jumlah Padukuhan Kalurahan Condongcatur

No.	Padukuhan	RW	RT
1.	Tiyasan	2	6
2.	Manukan	4	9
3.	Pondok	2	6
4.	Sanggrahan	3	8
5.	Gempol	3	18
6.	Dero	5	28
7.	Ngrigin	5	18
8.	Ngropoh	4	10
9.	Dabag	3	10
10.	Gejayan	4	10
11.	Kaliwaru	3	7
12.	Soropan	3	11
13.	Pringwulung	4	15
14.	Kayen	4	14
15.	Kentungan	5	11
16.	Pikgondang	3	11
17.	Gandok	3	10
18.	Joho	4	10
Jumlah		64	211

*Sumber: Data Profil Kalurahan Condongcatur tahun 2023*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa kapasitas Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun di Kalurahan Condongcatur sebagai berikut:

1. Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun belum memiliki **kapasitas regulasi**. Hal tersebut dapat menjadi suatu kendala tersendiri dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kapasitas regulasi merupakan kemampuan pemerintah kalurahan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat kalurahan dengan peraturan kalurahan
2. Lurah telah memiliki **kapasitas ekstraksi** yang merupakan kemampuan mengumpulkan, mengetahkan, dan mengoptimalkan aset-aset kalurahan untuk menopang kebutuhan/ kepentingan pemerintah dan warga masyarakat. Yaitu dengan memberikan modal untuk mendorong partisipasi masyarakat agar dapat mencapai tujuan desa membangun. Sebagaimana masyarakat merupakan salah satu aset yang dimiliki kalurahan yang disebut aset manusia guna menunjang pembangunan yang baik.

3. Lurah memiliki **kapasitas distributif** dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun, hal tersebut ditunjukkan dengan pembagian sumber daya secara merata pada setiap RW yaitu diadakannya proram Rp. 40.000.000-, per RW
4. Lurah memiliki **kapasitas responsif** dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana guna mendorong partisipasi untuk mencapai desa membangun. Hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat yang telah memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Seperti pemeliharaan gedung pertemuan, balai, dan perpustakaan milik kalurahan.
5. Lurah telah memiliki **kapasitas jaringan** untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama dengan pihak luar melalui jalinan kerjasama dengan PT. Pertamina.. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara kalurahan dengan PT Pertamina untuk membentuk pom bensin, CC Mart dan Nitrogen. Dengan usaha yang ada dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk melestarikan dan menjaga serta memanfaatkan fasilitas karena merupakan usaha yang bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran bahwa Lurah sebaiknya memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dengan menggunakan kapasitas regulasi untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa membangun dengan cara membuat peraturan kalurahan tentang partisipasi masyarakat. Dengan tujuan mempermudah untuk mengkoordinir masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam desa membangun

## LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara dengan  
Kamituwa



Dokumentasi Wawancara dengan  
Tokoh Masyarakat



Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh  
Masyarakat



Dokumentasi Wawancara dengan  
Ulu-ulu



Dokumentasi Wawancara dengan  
Lurah Codnongcatur



Dokumentasi Wawancara dengan  
Kamituwa



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/V/2020)

Alamat: Jl. Tenowo No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 560775, Fax. (0274) 515889 - Yogyakarta 55225

Nomor : 181/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Setyaningsih  
No. Mahasiswa : 19520004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022  
Judul Proposal : Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Penanggulangan  
Kemiskinan Pasca Pandemi

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Catatan: Mohon diarahkan Kalurahan Patuk  
sudah terlalu banyak

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• SIKIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PRODI STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• SIKIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN, PROGRAM MAJISTER, TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 615993, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 400/1/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 15 Mei 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Setyaningsih  
No Mhs : 19520004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Governability Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Desa Membangun.  
Tempat : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman  
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Mei 2023

Ketua  
  
Dikantoro Yunanto  
NIP. 230 190





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBIODIPAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM TPI, DIPA, TUGAS, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KEMAHASISWAAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

**SURAT TUGAS**  
Nomor :224/IT/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Setyaningsih  
Nomor Mahasiswa : 19520004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok,  
Kabupaten Sleman  
b. Sasaran : Governability Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong  
Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Desa  
Membangun.  
c. Waktu : 15 Mei 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 Mei 2023



**PERHATIAN :**  
Setelah selesai melaksanakan penelitian,  
mohon surat tugas ini diserahkan kepada  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat  
Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat  
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa  
tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON DEPOK  
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR

ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦕꦺꦤꦕꦠꦸꦫ  
Jalan Anggajaya II / 01 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, 55283  
Telepon : (0274) 885689. Email : [condongcatur1946@gmail.com](mailto:condongcatur1946@gmail.com)

34.04.07.2003

**SURAT KETERANGAN IZIN KEGIATAN**

Nomor : 070 / 020

Berdasarkan surat pengantar permohonan izin penelitian dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat "APMD" Yogyakarta dengan Nomor: 400/I/U/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi.

Bersama ini kami Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan Surat Keterangan Penelitian di wilayah Kalurahan Condongcatur bagi:

Nama : Setyaningsih  
NIM : 19520004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat "APMD" Yogyakarta  
Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi  
Lokasi : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama tersebut di atas akan melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul, "Governability Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Desa Membangun". Kegiatan dilaksanakan bertempat di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Kegiatan dimulai tanggal 15 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah tempat kegiatan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kalurahan Condongcatur.

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut.

Demikian agar menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Condongcatur, 29 Mei 2023  
a.n Lurah Condongcatur  
  
RISTA DIAN NURLLESTARI, S.TP, M.Sc.







PEMERINTAH KALURAHAN  
**CONDONGCATUR**  
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DIY



H. BENI CANDRA SANGAJI, S.P., M.P.  
LURAH CONDONGCATUR

# APBKal 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

**TOTAL PENDAPATAN**  
**Rp 12.340.240.020,27**

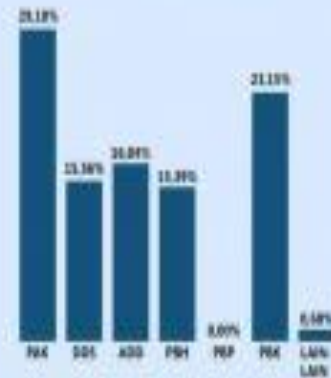
PENDAPATAN ASLI KALURAHAN (PAK)	Rp 5.680.000.000,00
DANA DESA (DD)	Rp 1.929.468.000,00
ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp 1.078.621.366,27
BAGI HASIL, PALANG DAN RETRIBUSI DAERAH (PR)	Rp 1.960.000.000,00
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI (BP)	Rp -
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KABUPATEN (BK)	Rp 2.655.946.754,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp 81.800.000,00

**PEMBIAYAAN KALURAHAN**

PEMBIAYAAN KALURAHAN (PK)

**SILPA Rp 393.704.333,27**

**TOTAL BELANJA**  
**Rp 16.946.535.687,00**



**PENGUNAAN DANA DESA 2023**

Dipertanggungjawabkan Rp 1.929.468.000,00 (100%) dan Penyerapan Rp 1.929.468.000,00 (100%)

Kelembagaan Kelurahan	Rp 1.929.468.000,00
Kelembagaan Desa	Rp 1.929.468.000,00
Membantu/Memberikan Bantuan/Memberikan Pinjam	Rp 1.929.468.000,00
Belanja Lain-lain	Rp 1.929.468.000,00

**TOTAL DANA DESA 2023**  
**Rp 1.929.468.000,00**



condongcatur  
kalurahancondongcatur  
condongcatursd.slemah.go.id

**Condongcatur Tangguh dan Tetap Tumbuh**

Jl. Aringgaja 1 No. 1, Gejayan Condongcatur, Depok Sleman 55291, Telp. 0274 - 885600





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010)

**KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : SETYANINGSIH  
**No Mahasiswa** : 19520004  
**Judul Skripsi** : Kapasitas Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun  
**Dosen Pembimbing** : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si  
**Mulai Bimbingan** : Kamis, 27 Oktober 2022

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
27/2022 Okt	Revisi Latar belakang Masalah.	
9/2022 Nov	Revisi Latar belakang dan pemahaman teori	
23/2022 Nov	Revisi Latar belakang dan penambahan rumusan masalah	
22/2023 Feb	Revisi latar belakang dan pelengkapan. Proposal	
10/2023 Mar	Revisi naskah latar belakang, rumusan masalah dan pemahaman teori	
29/2023 Mar	Revisi ulang dan pelengkapan proposal	
29/2023 Apr	Acc proposal	
19/2023 Jul	Ujian Pra kualifikasi	
30/2023 Jan	Acc sedang ujian	

--	--	--

Mengetahui / Menyetujui  
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi



Dosen Pembimbing



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Lurah**

1. Bagaimana pembangunan di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok kabupaten Sleman?
2. Seperti apa partisipasi masyarakat saat ini terhadap desa membangun?
3. Bagaimana bapak dalam melaksanakan Transparantif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
4. Bagaimana bapak dalam melaksanakan Responsif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
5. Bagaimana bapak dalam melaksanakan partisipatif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
6. Bagaimana bapak dalam melaksanakan interkasi sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
7. Bagaimana bapak dalam melaksanakan kerjasama sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?

### **Pamong Kalurahan**

1. Bagaimana pembangunan di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok kabupaten Sleman?
2. Seperti apa partisipasi masyarakat saat ini terhadap desa membangun?
3. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan Transparantif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?

4. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan Responsif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
5. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan partisipatif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
6. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan interkasi sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
7. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan kerjasama sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun

#### **Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
2. Sejauh ini seperti apa pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat?
3. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan transparantif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
4. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan Responsif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
5. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan partisipatif sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
6. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan interkasi sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?
7. Bagaimana Lurah dalam melaksanakan kerjasama sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat terhadap desa membangun?



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisamita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bungin, Burhan (Ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hakim. Em. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Ar Ruzz Media.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas (Institutional Capacity Development) Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Ap 21-Pres.
- Iskandar, Huraerah. 2004. *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga,
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,
- Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka,
- Nasution, Zulkarnain. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press, 2009.
- Pangbean, Mutiara S. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Purnamasari, Dewi. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, Universtas Indonesia. Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*: Setara Press,
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta
- Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press.
- Usman Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Widjaja HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Akbar, Muh.Firyal, Suprpto, Srihandayani, dan Surati. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo* Vol 6 No 2.
- Ariadi, Andi. 2019. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA*. Vol 2 No 2.

- Asrifai. 2021. *Governability in Central Sulawesi: An Assessment of Government Capacity to Support Minorities of the Regional Representative of Central Sulawesi Province*. Vol 10 No 1. Diakses 23 Januari 2023.
- Ecin, Sante dkk. 2023. ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). Vol 23 No 1.
- Erwan, Putra Ketut. 2009. *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang baik: Partisipasi, Transparantif, dan Akuntabilitas. Monograph on Politics and Government*. Vol. 3, No. 1.
- Hardjanto, Imam, (2006), *Pembangunan Kapasitas Lokal ( local capacity building)*. Program pascasarjana universitas brawijaya, malang.
- Kholik, Saeful. 2020. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH, Vol 6. No 1. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Yogyakarta:
- Mono Asdar dan Samaloisa, Rijel. 2022. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*. Vol 3 No 2. Hal 113-121.
- Noor, Muhammad. 2019. *VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY STRENGTHENING MODEL AS MAJOR AGENDA FOR VILLAGE MANAGEMENT OPTIMIZATION TOWARDS INDEPENDENCE (Case Study of Maipe Village, Paju Epat Sub-District, East Barito Regency)*. Vol 3 No 1. Diakses 10 Januari 2023.
- Setiawan, Agustina dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung* Vol 3 No 2. Diakses 22 Desember 2022.
- Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa*. Binamulia Hukum 7 (1). 82-95. Diakses, 3.Maret 2023.
- Takdir, Muhammad dan Jusniaty. 2019. “*Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*”.